

ANALISIS KRITIS NEOCLASSICAL REALISM: STUDI KASUS INVASI RUSIA TERHADAP UKRAINA PERIODE (2022)

Nadirah¹, Alif Ariaputra^{1*}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

*Corresponding email: alifaputra@gmail.com

Abstract

The Russian invasion of Ukraine in 2022 has reignited debate on global security and foreign policy behavior of great powers. This study analyzes the underlying drivers of Russia's foreign policy decisions using a three-level theoretical framework. At the grand theory level, classical realism explains the anarchic nature of international politics and the centrality of power. At the middle theory level, Neoclassical Realism (NCR) is applied to link systemic pressures with domestic variables—particularly elite perceptions and strategic culture. At the applied level, the concept of overbalancing is used to explain Russia's aggressive posture. Utilizing a qualitative method and literature review, the study examines government documents, academic journals, and institutional reports. Findings show that Russia's invasion was shaped not only by NATO's perceived encroachment but also by internal political needs to reinforce regime legitimacy. This research highlights the explanatory power of NCR in capturing the complexity of state behavior that cannot be fully explained by systemic-level analysis alone. The study contributes to foreign policy literature by offering a multidimensional understanding of aggression in contemporary international relations.

Keywords: Russia, Ukraine, Neoclassical Realism, overbalancing, foreign policy, aggression

Abstrak

Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 kembali memicu perdebatan mengenai keamanan global dan perilaku kebijakan luar negeri negara besar. Penelitian ini menganalisis akar kebijakan agresif Rusia dengan menggunakan pendekatan tiga tingkat teori. Pada tingkat grand theory, realisme klasik digunakan untuk menjelaskan anarki sistem internasional dan sentralitas kekuasaan. Pada tingkat middle theory, Neoclassical Realism (NCR) menjembatani tekanan sistemik dengan variabel domestik seperti persepsi elite dan budaya strategis. Pada tingkat applied theory, konsep overbalancing digunakan untuk menjelaskan kebijakan ofensif Rusia. Dengan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji dokumen pemerintah, artikel jurnal, dan laporan institusional. Hasilnya menunjukkan bahwa invasi Rusia tidak semata-mata dipicu oleh ekspansi NATO, tetapi juga oleh kebutuhan internal untuk mengonsolidasikan legitimasi politik domestik. Studi ini menunjukkan keunggulan NCR dalam menjelaskan kompleksitas perilaku negara yang tak dapat diuraikan secara memadai oleh teori sistemik semata. Penelitian ini berkontribusi pada literatur kebijakan luar negeri dengan menawarkan pemahaman multidimensi atas agresi dalam hubungan internasional kontemporer.

Kata Kunci: Rusia, Ukraina, Neoclassical Realism, overbalancing, kebijakan luar negeri, agresi

PENDAHULUAN

Tak dapat dipungkiri isu invasi Rusia terhadap Ukraina merupakan salah satu diskursus paling populer baik di kalangan publik maupun akademik hubungan internasional sejak 24 Februari 2022. Pemahaman masyarakat internasional tentang bahaya perang ini

pun terus meningkat karena pengalaman langsung masyarakat global terhadap dampak nyata perang tersebut, khususnya dalam bentuk gangguan ekonomi lintas negara, yang ditandai dengan naiknya harga pangan, minyak, inflasi yang berkepanjangan, pengerekan suku bunga secara terus menerus, yang secara kumulatif dapat meningkatkan

kemungkinan *stagflasi* yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan inflasi (World Bank, 2022; IMF, 2022).

Isu invasi ini juga menimbulkan dampak politik dan militer yang signifikan. Pergerakan pasukan Rusia ke wilayah Ukraina memicu gelombang reaksi dari negara-negara Barat, termasuk sanksi ekonomi, pengiriman bantuan militer ke Ukraina, serta konsolidasi posisi NATO di Eropa Timur. Situasi ini memperlihatkan kompleksitas konflik yang tidak hanya bersifat bilateral antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap dinamika keamanan kawasan dan global. Selain itu, krisis kemanusiaan akibat invasi, termasuk pengungsian jutaan warga sipil, turut memperparah dampak jangka panjang dari konflik tersebut. Hingga akhir 2023, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat lebih dari 10 juta orang mengungsi baik secara internal maupun ke luar negeri, dengan kerusakan infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan pembangkit listrik yang sangat luas (UNHCR, 2023).

Dalam jangka menengah, invasi ini juga memunculkan realokasi strategis dalam kebijakan luar negeri negara-negara Eropa. Beberapa negara yang sebelumnya mempertahankan netralitas militer seperti Finlandia dan Swedia menyatakan keinginan untuk bergabung ke dalam NATO. Sementara itu, Jerman mengumumkan reorientasi kebijakan pertahanannya melalui penguatan anggaran militer, mengakhiri kebijakan militer pasif yang diterapkan sejak Perang Dunia II. Ini menunjukkan bahwa dampak dari invasi Rusia tidak hanya bersifat militer dan ekonomi, tetapi juga ideologis dan strategis dalam

membentuk kembali arsitektur keamanan regional di Eropa.

Tentu saja konflik ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Dalam literatur resolusi konflik, akomodasi seringkali diposisikan sebagai mekanisme penting dalam menghadapi konflik berkepanjangan yang melibatkan aktor negara besar, karena memberikan peluang untuk meredakan eskalasi dan menciptakan ruang negosiasi. Akomodasi sebagai penyelesaian konflik adalah strategi di mana satu pihak memberikan konsesi kepada pihak lain dalam mencapai konsensus untuk bisa beranjak ke tahap resolusi konflik selanjutnya (Beardsley, 2014, hlm. 364). Dalam sebuah *policy brief* oleh Toda Peace Institute (2023), Hugh Miall menekankan bahwa jika komitmen keamanan dari NATO ditarik dan Ukraina ditetapkan sebagai negara netral, maka kemungkinan tercapainya gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia akan meningkat (Miall, 2023). Meskipun opsi tersebut masih dipandang sebagai wacana spekulatif, sejumlah literatur akademik menggarisbawahi bahwa perluasan NATO ke timur sejak akhir 1990-an telah menjadi sumber utama ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat (Waltz, 2000; Mearsheimer, 2014).

Fenomena invasi Rusia ini telah banyak dianalisis dari berbagai perspektif. Namun, sejumlah studi yang beredar cenderung memfokuskan analisis pada aspek struktural semata, seperti ketegangan antara Rusia dan NATO atau posisi Rusia dalam sistem internasional. Hal ini mengabaikan dinamika domestik seperti persepsi elite, faktor institusional, serta mobilisasi politik internal yang turut memengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri. Beberapa pengamat menyebut bahwa dukungan internal terhadap

kebijakan agresif Rusia turut dipengaruhi oleh penguatan kontrol politik domestik, represi terhadap oposisi, serta penggunaan propaganda negara yang mengonstruksi ancaman eksternal sebagai justifikasi kebijakan luar negeri ofensif.

Dengan memahami keterbatasan literatur yang ada, maka pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apa yang sesungguhnya mendorong Rusia untuk mengambil kebijakan yang bersifat ofensif terhadap Ukraina, meskipun konsekuensinya sangat besar bagi posisi strategis dan ekonomi domestiknya sendiri? Pertanyaan ini menjadi dasar untuk menggali lebih dalam motif kebijakan luar negeri Rusia dan menjelaskan proses-proses yang mendasari keputusan invasi tahun 2022.

Sejalan dengan itu, penting pula dicermati bahwa kebijakan luar negeri Rusia tidak hanya berdampak pada dinamika regional, melainkan juga terhadap arsitektur global. Konflik ini memperkuat polarisasi dalam sistem internasional yang semakin multipolar, dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Brasil mengambil posisi yang lebih hati-hati atau bahkan netral dalam merespons invasi Rusia. Sementara itu, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat mendorong Rusia untuk memperkuat aliansi strategis non-Barat, terutama dalam kerangka BRICS dan SCO (Shanghai Cooperation Organization). Hal ini mencerminkan bahwa konflik Ukraina juga menjadi arena uji bagi solidaritas dan kapasitas adaptif lembaga-lembaga internasional.

Dengan demikian, kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk melihat konflik Rusia-Ukraina secara lebih komprehensif, tidak hanya sebagai benturan kepentingan geopolitik, tetapi juga sebagai hasil dari dinamika internal yang kompleks. Penjelasan yang

dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas pemahaman akademik mengenai konflik kontemporer dan memperkaya literatur kebijakan luar negeri negara besar dalam sistem internasional multipolar.

Struktur penulisan artikel ini dibagi menjadi lima bagian utama: pendahuluan yang mengulas latar belakang dan relevansi isu; kerangka teoritik yang menjelaskan fondasi konseptual dan pendekatan analitis; metodologi yang memaparkan teknik dan strategi penelitian; pembahasan yang menganalisis temuan berdasarkan data dan teori; serta kesimpulan yang merangkum hasil, implikasi, dan kontribusi kajian ini terhadap pengembangan studi kebijakan luar negeri dan dinamika hubungan internasional kontemporer.

KERANGKA ANALISIS

Untuk memberikan pemahaman yang sistematis terhadap kebijakan luar negeri Rusia dalam konflik Ukraina, penelitian ini menggunakan kerangka analisis tiga tingkat: teori besar (*grand theory*), teori menengah (*middle theory*), dan teori terapan (*applied theory*). Pendekatan ini memungkinkan kajian yang tidak hanya membedah dinamika kekuasaan dalam sistem internasional, tetapi juga menyelami dimensi domestik serta perilaku spesifik kebijakan yang diambil negara. Dalam hal ini, teori terapan (*applied theory*) yang digunakan adalah konsep *overbalancing*, yang menjelaskan kecenderungan negara untuk menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam menanggapi ancaman yang dipersepsikan, sehingga justru merugikan kepentingan strategis jangka panjangnya.

Dalam menjelaskan dinamika kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina, penting untuk memahami interaksi antara struktur internasional dan faktor domestik dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kajian ini menggunakan pendekatan teoritis yang menggabungkan berbagai level analisis dalam studi hubungan internasional untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena yang dikaji.

Pertama, pada tataran makro, teori *realisme* diposisikan sebagai landasan teoritis utama yang menjelaskan bahwa sistem internasional bersifat anarkis dan bahwa negara bertindak sebagai aktor rasional yang mengejar kepentingan nasional mereka dalam konteks persaingan kekuasaan. Pemikiran ini berakar dari karya-karya klasik seperti Morgenthau (1948) dan Waltz (1979), yang menekankan bahwa dalam ketidakpastian sistem internasional, negara tidak dapat mengandalkan otoritas supranasional, sehingga peningkatan kapabilitas militer dan aliansi strategis menjadi pilihan rasional untuk menjamin keamanan. Dalam konteks ini, konsep *security dilemma* juga penting untuk dipahami, di mana peningkatan kekuatan oleh satu negara dapat dilihat sebagai ancaman oleh negara lain, yang kemudian memicu aksi balasan dan eskalasi konflik.

Namun, keterbatasan *realisme* struktural dalam menjelaskan variasi kebijakan luar negeri antar negara yang menghadapi tekanan eksternal yang serupa mendorong digunakannya *neoclassical realism* sebagai teori tingkat menengah (*middle-range theory*). *Neoclassical realism*, sebagaimana dikembangkan oleh Gideon Rose (1998), mengintegrasikan variabel domestik seperti persepsi elite, struktur birokrasi, dan legitimasi politik

dalam menjelaskan bagaimana negara merespons kondisi eksternal. Teori ini mengasumsikan bahwa tidak semua negara akan merespons ancaman sistemik dengan cara yang sama, karena terdapat filter domestik yang memediasi persepsi dan tindakan negara. Faktor-faktor seperti personalisasi kekuasaan, preferensi elite, serta instrumen ideologi domestik turut membentuk pola interaksi negara dengan lingkungan eksternal.

Dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina, *neoclassical realism* memberikan kerangka yang memadai untuk memahami bagaimana elite politik Rusia, khususnya Presiden Vladimir Putin, menafsirkan ekspansi NATO sebagai ancaman eksistensial yang menjustifikasi tindakan agresif. Persepsi ini tidak hanya bersumber dari kalkulasi strategis rasional, tetapi juga dari konstruk ideologis tentang wilayah pengaruh historis Rusia, trauma geopolitik pasca-perang dingin, dan keinginan untuk memulihkan status sebagai kekuatan besar. Faktor-faktor ini diperkuat oleh struktur politik domestik yang terpusat, lemahnya oposisi politik, serta kontrol terhadap media yang memungkinkan mobilisasi nasionalisme dan justifikasi kebijakan luar negeri yang konfrontatif. Analisis ini juga mencerminkan pentingnya memahami peran agensi elite dalam politik luar negeri, terutama dalam sistem otoriter di mana keputusan strategis sangat terpusat.

Lebih lanjut, teori ini juga menjelaskan fenomena *overbalancing*, yaitu ketika negara merespons ancaman dengan alokasi sumber daya yang berlebihan sehingga justru menimbulkan efek negatif terhadap kepentingan strategisnya sendiri (Ripsman, Taliaferro, & Lobell, 2009). Dalam kasus Rusia, keputusan untuk menginvasi Ukraina secara militer

memicu sanksi ekonomi global, pelemahan hubungan dagang, dan isolasi diplomatik yang menggerus kekuatan ekonomi domestik serta memperburuk posisi strategis Rusia dalam jangka panjang. Tindakan tersebut dapat dilihat sebagai kegagalan dalam mengkalibrasi antara persepsi ancaman dan respons kebijakan yang proporsional.

Dalam kerangka teoritik ini, penting juga memperhatikan dimensi ideasional dan historis yang melandasi orientasi kebijakan luar negeri Rusia. Konsep *strategic culture* atau budaya strategis digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai historis, pengalaman konflik, dan memori kolektif turut memengaruhi pola pengambilan keputusan keamanan dan pertahanan suatu negara. Dalam konteks Rusia, warisan Soviet, pengalaman pembubaran Uni Soviet, serta memori kekalahan dalam Perang Dingin menjadi referensi historis yang membentuk pandangan elite terhadap ancaman eksternal dan pentingnya mempertahankan zona pengaruh di wilayah eks-Uni Soviet.

Penggunaan pendekatan *multilevel theory* dalam studi ini bertujuan untuk menghindari reduksionisme metodologis dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam atas kompleksitas dinamika hubungan internasional kontemporer. Kajian ini tidak hanya menempatkan Rusia sebagai aktor rasional dalam sistem internasional, tetapi juga sebagai entitas politik yang dibentuk oleh dinamika internal dan konstruksi ideasional yang kompleks. Pendekatan ini juga membuka kemungkinan integrasi dengan metode kajian *foreign policy analysis* (FPA) untuk memahami proses keputusan secara lebih mikro.

Dengan demikian, kerangka teoritik yang digunakan dalam studi ini memungkinkan pemahaman yang

komprehensif terhadap keputusan invasi Rusia ke Ukraina sebagai produk dari interaksi antara tekanan sistemik, interpretasi elite domestik, dan konfigurasi politik internal. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk menjelaskan implikasi jangka panjang dari kebijakan luar negeri Rusia terhadap keseimbangan kekuatan global dan stabilitas kawasan Eropa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang untuk menelusuri keterkaitan antara berbagai faktor penyebab dan konsekuensi dari fenomena invasi Rusia terhadap Ukraina secara mendalam dan kontekstual. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan sebab-akibat antara variabel-variabel yang relevan, bukan sekadar menggambarkan fenomena secara deskriptif. Dalam konteks ini, peneliti berupaya memahami latar belakang, dinamika, serta implikasi dari kebijakan luar negeri Rusia dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam mengkaji kebijakan luar negeri sebagai produk dari dinamika politik dan sosial yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif, tetapi memerlukan pemahaman interpretatif terhadap makna dan konteks.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka mencakup penelusuran terhadap berbagai literatur ilmiah, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri

dan konflik Rusia–Ukraina. Dokumen-dokumen yang digunakan dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan otoritas sumber dalam menjelaskan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai repositori digital seperti *JSTOR*, *Scopus*, dan *Google Scholar*, serta dokumen kebijakan dari situs resmi lembaga-lembaga seperti Kementerian Luar Negeri Rusia, NATO, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peneliti juga memanfaatkan laporan dari lembaga kajian strategis seperti *Carnegie Endowment for International Peace* dan *RAND Corporation* sebagai sumber pelengkap. Selain itu, artikel berita dari media kredibel seperti *BBC*, *The Guardian*, dan *Kommersant* digunakan untuk memperkaya konteks dan kronologi peristiwa.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *analisis tematik*. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari data sekunder yang telah dikumpulkan. Analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi yang kohesif dan mendalam tentang hubungan antara faktor internasional, domestik, dan ideologis yang melandasi kebijakan invasi Rusia. Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data dengan memilah informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, (2) penyajian data dalam bentuk pola atau kategori tematik, dan (3) penarikan kesimpulan secara induktif dari hubungan antar tema.

Validitas data dalam penelitian ini diuji melalui teknik *triangulasi sumber*, yaitu membandingkan temuan dari berbagai jenis dokumen dan publikasi yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu,

keterlibatan aktif peneliti dalam melakukan verifikasi silang antar sumber juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan keandalan interpretasi.

PEMBAHASAN

Distribusi Kekuasaan Relatif dan Faktor Struktural dalam Variabel Independen

Di dalam variabel independen terdapat di dalamnya beberapa *structural modifiers* berupa distribusi kekuasaan relatif, keseimbangan serangan-pertahanan, dan kedekatan geografis. Distribusi relatif kekuasaan adalah *modifiers* dalam teori realisme neoklasik yang mempengaruhi *modifiers* setelahnya, seperti keseimbangan serangan-pertahanan dan geografi. Kekuasaan (*power*), seperti banyak konsep penting lainnya dalam hubungan internasional, sering menjadi perdebatan sengit. Akan tetapi perdebatan tersebut tidak jarang memberikan kita sedikit kesepakatan di antara berbagai aliran teori tentang apa yang disebut dengan kekuasaan, apalagi tentang cakupan relatif di dalam kekuasaan seperti kekuasaan negara berdasarkan demokrasi, lembaga internasional, norma-norma, dan identitas.

Dalam konteks realisme neoklasik, Ripsman, Norrin M., Jeffrey W. Taliaferro, dan Steven E. Lobell mengidentifikasi dua pendekatan dominan terhadap kekuasaan: pertama pendekatan kekuasaan relasional yang menggambarkan kekuasaan sebagai hubungan aktual atau potensial antara aktor, kedua pendekatan elemen kekuatan nasional, yang memperlakukan kekuasaan sebagai sumber daya. (Lobell, et al 2016). Dalam kasus ini kami menggunakan pendekatan kekuatan relasional berupa diplomasi sebagai elemen dalam utilisasi kekuasaan

nasional dalam memaksimalkan keamanan negara. Dengan kata lain, dikarenakan argumen utama realisme neoklasik adalah bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk oleh interaksi antara kondisi internasional dan domestik, di bagian *relative distribution of power* ini yang ditafsirkan sebagai kondisi internasional atau *stimulan sistemik*, penulis berargumen bahwa distribusi kekuasaan yang dilakukan oleh Ukraina untuk memaksimalkan keamanan mereka melawan agresi Rusia dengan mencoba untuk bergabung dengan NATO merupakan ancaman eksternal bagi Rusia terhadap negara yang ia pandang sebagai *sphere of influence*-nya, sehingga menjadi salah satu alasan mengapa Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina.

Integrasi Ukraina ke dalam Uni Eropa dan NATO—yang menjadi bagian dari strategi distribusi kekuasaan Ukraina—memicu kekhawatiran Rusia akan kehilangan kendali strategis terhadap kawasan yang dianggap vital bagi kepentingan nasionalnya. Upaya integrasi tersebut bukan sekadar persoalan keanggotaan formal dalam institusi internasional, tetapi mencerminkan arah geopolitik dan identitas nasional Ukraina yang semakin menjauh dari orbit Rusia. Bagi Rusia, hal ini menandai ancaman serius terhadap stabilitas regional yang selama ini dikendalikan melalui pendekatan kekuasaan hierarkis di ruang pasca-Soviet. Distribusi kekuasaan ini bukan hanya dilihat dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dari *soft power* dan kapasitas diplomatik Ukraina untuk menarik simpati negara-negara Barat.

Perjalanan Zelensky ke Brussels dan upaya mendapatkan *Membership Action Plan* (MAP) menjadi sinyal kuat bahwa Ukraina hendak bertransformasi menjadi bagian integral dari arsitektur keamanan

dan ekonomi Barat. Walaupun hanya diberikan status *Enhanced Opportunities Partner* (EOP), status ini tetap dipersepsikan oleh Rusia sebagai eskalasi bertahap terhadap lingkungan strategisnya. Penempatan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina sejak musim semi 2021 merefleksikan respons terhadap persepsi ancaman yang meningkat, bukan hanya dari aspek militer tetapi juga identitas politik dan orientasi kebijakan luar negeri Ukraina.

Di sisi lain, narasi resmi Ukraina dalam *White Paper on Defense* 2022 dan pernyataan kebijakan dari NATO-Ukraine Council menunjukkan bahwa Ukraina tidak hanya mencari keamanan fisik, tetapi juga keamanan institusional yang berakar pada norma demokrasi dan integrasi regional. Klausula pertahanan bersama dari Uni Eropa, serta Artikel 5 NATO, menjadi instrumen strategis yang diharapkan dapat memberikan efek penangkal terhadap agresi Rusia. Namun demikian, dari sudut pandang Rusia, langkah-langkah ini justru memperkuat persepsi bahwa Ukraina secara aktif membangun koalisi yang dapat digunakan sebagai pangkalan militer potensial di perbatasan Rusia.

Dalam pandangan *defensive realism*, tindakan Ukraina dapat dipahami sebagai langkah defensif untuk meningkatkan keamanan dalam situasi sistem internasional yang anarkis dan penuh ketidakpastian. Namun realisme neoklasik menekankan bahwa persepsi elite Rusia, narasi ancaman, dan konteks historis—seperti pengalaman invasi dari Barat dalam sejarah Rusia—memainkan peran krusial dalam membentuk respons yang bersifat *overbalancing*.

Distribusi kekuasaan tidak bersifat statis, tetapi distribusi kekuasaan tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan dibentuk oleh interaksi persepsi ancaman, aliansi strategis, serta kedalaman historis

hubungan antar negara. Dalam hal ini, diplomasi Ukraina yang bertujuan mendekat ke Barat berfungsi sebagai mekanisme *soft balancing*, namun dipersepsikan Rusia sebagai *hard balancing* yang mengancam langsung terhadap kepentingan vitalnya. Reaksi Rusia yang berupa invasi dapat dilihat sebagai produk dari kegagalan dalam membaca intensi pihak lawan secara akurat, yang diperburuk oleh absennya institusi internasional yang mampu menjembatani konflik kepentingan ini secara efektif.

Dengan demikian, variabel independen berupa distribusi kekuasaan relatif menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan persepsi dapat memperbesar eskalasi konflik. Realisme neoklasik memungkinkan kita untuk melihat bahwa keputusan invasi Rusia bukan hanya didorong oleh kapabilitas militer semata, tetapi oleh persepsi strategis tentang hilangnya pengaruh dan meningkatnya ancaman terhadap *strategic buffer zone*.

Distribusi kekuasaan ini juga berkaitan erat dengan doktrin pertahanan Rusia yang menekankan pada *active defense* dan pencegahan terhadap pembangunan *forward operating bases* oleh kekuatan Barat di wilayah yang dekat dengan Rusia. Hal ini menjelaskan mengapa Ukraina dianggap lebih dari sekadar negara tetangga biasa, melainkan sebagai ruang strategis yang harus dijaga untuk mempertahankan stabilitas jangka panjang Rusia di kawasan Eurasia.

Konflik Rusia-Ukraina dalam Variabel Intervening

Sebagaimana dijelaskan oleh Steven Lobell, Jeffrey Taliaferro, dan Norrin Ripsman (2009, 2016), realisme neoklasik berbeda dengan realisme struktural (*neorealisme*) karena menggabungkan variabel penghubung

(*intervening*) domestik yang mengkondisikan bagaimana negara menanggapi *stimuli* sistemik internasional berdasarkan kapasitas dan kapabilitas domestik yang dimiliki. Terdapat empat *structural modifiers* dari variabel penghubung ini yang 'mengintervensi' interpretasi negara terhadap suatu *stimuli* internasional, yaitu: (1) hubungan negara-masyarakat (*state-society relations*), (2) persepsi pemimpin (*leader perception*), (3) budaya strategis (*strategic culture*), dan (4) struktur kelembagaan domestik (*domestic political regime*). Variabel-variabel ini mencakup dimensi psikologis, organisasi birokrasi, dukungan masyarakat, dan konfigurasi kelembagaan negara yang memengaruhi kebijakan luar negeri. Keempat variabel ini tidak hanya menjelaskan dinamika internal negara, tetapi juga memberikan penjelasan tentang keragaman respons terhadap tekanan sistemik yang sama.

Hubungan negara-masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan negara untuk memobilisasi sumber daya domestik demi kepentingan kebijakan luar negeri. Interaksi antara lembaga-lembaga negara dan berbagai kelompok sosial, termasuk dukungan masyarakat terhadap keputusan elite politik dalam menghadapi krisis eksternal, memengaruhi efektivitas mobilisasi nasional. Dalam konteks Rusia, nasionalisme yang didukung negara dan dominasi ideologi pro-elit memperkuat kohesi sosial, memungkinkan pemerintah untuk mengekstrak dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Hasil survei oleh Levada Center pada Februari 2022 menunjukkan tingkat dukungan masyarakat Rusia yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri Presiden Vladimir Putin, termasuk dalam invasi

ke Ukraina. Persepsi ancaman terhadap kelompok berbahasa Rusia di Donbas dan narasi tentang pertahanan terhadap ekspansi NATO digunakan untuk membangun *rally-around-the-flag effect*. Dalam situasi seperti ini, masyarakat umumnya menunjukkan konformitas terhadap keputusan pemerintah karena meyakini bahwa intervensi militer merupakan langkah yang sah dan diperlukan.

Sentimen anti-Barat dan narasi bahwa Amerika Serikat berusaha mengepung dan menundukkan Rusia semakin memperkuat dukungan domestik terhadap kebijakan agresif. Fenomena ini memperlihatkan bahwa relasi negara dan masyarakat dalam konteks Rusia dicirikan oleh konsolidasi ideologis dan pembungkaman krisis sebagai isu eksistensial, bukan sekadar konflik perbatasan.

Persepsi pemimpin (*leader perception*) sebagai *intervening variable* memperlihatkan bagaimana struktur nilai dan filter kognitif elite politik berperan dalam menafsirkan ancaman eksternal. Vladimir Putin sebagai *foreign policy executive* mengadopsi kerangka berpikir *statist* dan *derzhavnik*—yakni keyakinan bahwa negara harus kuat secara internal dan eksternal serta berperan sebagai kekuatan besar dalam sistem internasional. Pandangan ini mendorong strategi *overbalancing* terhadap ancaman yang dipersepsikan, seperti perluasan NATO atau kemajuan demokratisasi di negara-negara eks-Soviet.

Retorika Putin menekankan pentingnya Ukraina dalam narasi historis, identitas nasional, dan *spatial unity* Rusia. Dalam esainya tahun 2021, Putin menyatakan bahwa “kedaulatan sejati Ukraina hanya mungkin dalam kemitraannya dengan Rusia,” memperkuat klaim bahwa

wilayah Ukraina merupakan bagian dari *historical unity* bangsa Rusia. Pemaknaan ini menjadikan konflik tidak sekadar soal kebijakan luar negeri, tetapi sebagai perjuangan eksistensial untuk mempertahankan narasi sejarah dan klaim moral terhadap kawasan.

Budaya strategis (*strategic culture*) Rusia juga membentuk cara pandang elite dan masyarakat terhadap ancaman eksternal. Berdasarkan formulasi Jack Snyder (1977), budaya strategis mencerminkan seperangkat keyakinan, norma, dan praktik yang dilembagakan dalam strategi nasional. Dalam konteks Rusia, pengalaman invasi dari Barat dan kebutuhan untuk mempertahankan *buffer zone* strategis telah membentuk preferensi terhadap tindakan pencegahan agresif.

Dokumen-dokumen resmi seperti *National Security Strategy*, *Military Doctrine*, dan pidato-pidato kenegaraan Putin menunjukkan kontinuitas dalam persepsi ancaman dari Barat dan penekanan pada dominasi regional. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya strategis berfungsi sebagai parameter kognitif dan normatif dalam menyaring tekanan sistemik dan membentuk respons kebijakan luar negeri.

Struktur kelembagaan domestik Rusia memperkuat konsolidasi kekuasaan di tangan kelompok *siloviki*, yaitu elite yang berasal dari latar belakang keamanan seperti FSB dan militer. Koherensi elit ini mendukung pengambilan keputusan yang terpusat dan respons agresif terhadap krisis eksternal, termasuk melalui mobilisasi sumber daya ekonomi dan militer.

Dukungan terhadap invasi Ukraina juga berkaitan dengan insentif politik dan ekonomi elit. Konflik digunakan untuk meningkatkan legitimasi otoritarian, mengalihkan perhatian publik dari krisis

domestik, dan memperkuat kontrol politik. Pada saat yang sama, eksploitasi sumber daya strategis Ukraina, seperti cadangan energi, logam tanah jarang, dan industri berat di Donbas, menjadi motif ekonomi yang melengkapi dorongan ideologis dan geopolitik invasi.

Dengan demikian, variabel intervening dalam realisme neoklasik tidak hanya menjelaskan bagaimana tekanan sistemik ditranslasikan dalam kebijakan luar negeri, tetapi juga menegaskan pentingnya konfigurasi domestik dalam menghasilkan respons yang bersifat agresif. Konflik Rusia-Ukraina menjadi contoh konkret bagaimana hubungan negara-masyarakat, persepsi pemimpin, budaya strategis, dan struktur kelembagaan bersinergi dalam menciptakan keputusan invasi sebagai strategi *overbalancing*.

Kritik Konflik Rusia-Ukraina dalam Variabel Dependen

Variabel dependen dalam realisme neoklasik merujuk pada pilihan kebijakan luar negeri negara serta hasil-hasil internasional yang dihasilkan dari interaksi antara pilihan tersebut dan struktur sistem internasional. Perspektif ini memandang bahwa strategi besar yang diambil negara, seperti penggunaan kekuatan militer, tidak semata ditentukan oleh tekanan eksternal, melainkan juga oleh konfigurasi domestik internal yang kompleks.

Konsep "penyeimbangan" (*balancing*) menjadi fokus utama dalam mendiskusikan variabel dependen. Dalam kerangka realisme neoklasik, terdapat empat kategori utama dalam strategi penyeimbangan: (1) *appropriate balancing*, (2) *overbalancing*, (3) *non-balancing*, dan (4) *underbalancing*. Dalam konteks ini, invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 umumnya

dikategorikan sebagai bentuk *overbalancing*—yakni ketika negara bereaksi secara berlebihan terhadap ancaman yang sebenarnya dapat ditangani melalui langkah yang lebih proporsional.

Namun, pengkategorian tersebut memerlukan nuansa dan kritik lebih lanjut. Perang, meskipun destruktif, tidak selalu dapat disamakan dengan *overbalancing*. Dalam kondisi ekstrem, ketika negara menghadapi ketidakpastian tinggi dan tekanan strategis, keputusan untuk menggunakan kekuatan militer bisa dipahami sebagai upaya sadar dan rasional dalam mengamankan kepentingan nasional. Konteks sejarah seperti kegagalan kebijakan *appeasement* oleh Inggris dan Prancis terhadap Hitler pada tahun 1939–1940 menunjukkan bahwa penghindaran perang justru dapat menghasilkan kerugian strategis yang lebih besar.

Kasus Rusia dapat dianalisis melalui lensa serupa. Dalam narasi Kremlin, ekspansi NATO ke wilayah Eropa Timur dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial, sehingga menghindari perang dianggap sebagai bentuk *underbalancing*. Dengan demikian, keputusan Putin untuk menginvasi Ukraina tidak semata-mata hasil dari interpretasi ancaman yang keliru, melainkan bentuk tindakan preventif yang diyakini sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan ruang pengaruh dan otonomi strategis Rusia.

Namun demikian, dampak pasca-invasi menunjukkan bahwa kebijakan ini membawa konsekuensi yang tidak sebanding dan memperburuk kondisi domestik serta internasional Rusia. Di sinilah kritik utama terhadap realisme neoklasik dapat diarahkan: kerangka konseptual yang menyamakan perang dengan *overbalancing* berisiko

menyederhanakan kompleksitas dinamika konflik dan mengaburkan perbedaan antara motif, tindakan, dan dampaknya.

Kritik kedua adalah asumsi bahwa semua bentuk *overbalancing* berasal dari kombinasi variabel independen dan intervening yang sama. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan *argumentum ad nauseam*, di mana klaim bahwa perang adalah bentuk *overbalancing* terus diulang tanpa menyertakan basis empirik yang segar dan kontekstual. Sebaliknya, penilaian terhadap *overbalancing* seharusnya berbasis *case-specific* yang mempertimbangkan efek jangka panjang dan kerugian strategis yang timbul.

Dalam rangka menghindari jebakan penyamaan analitis, pembahasan ini menggunakan dua parameter utama sebagai kerangka evaluasi dampak invasi Rusia: *inward-looking* (domestik) dan *outward-looking* (internasional). Kategori *inward-looking* mencakup: (1) hilangnya momentum militer, (2) pemberontakan Wagner, dan (3) ketergantungan pada Tiongkok. Sementara *outward-looking* mencakup: (1) konsolidasi Dunia Barat, (2) masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO, dan (3) merosotnya status Rusia sebagai *great power*.

Hilangan momentum militer Rusia menjadi indikator utama kebijakan *overbalancing*. Serangan awal yang didasarkan pada asumsi perlawanan lemah terbukti keliru, dengan unit-unit Rusia menghadapi hambatan logistik, kurangnya koordinasi taktis, dan kegagalan untuk mencapai tujuan strategis seperti pendudukan Kyiv. Kekakuan struktur komando, rendahnya fleksibilitas taktis, dan keberhasilan strategi tipuan Ukraina menjadi faktor determinan yang memperburuk keadaan.

Kinerja industri pertahanan Rusia yang menurun turut memperkuat analisis bahwa perang ini melampaui kapasitas aktual negara. Penurunan produksi amunisi, ketergantungan pada stok lama era Soviet, dan sanksi Barat yang menghambat impor teknologi militer menunjukkan bahwa kebijakan ini telah melebihi kemampuan aktual negara.

Krisis manpower dan mobilisasi parsial menunjukkan kerentanan dalam menjaga kapasitas tempur berkelanjutan. Kesalahan administratif, pemanggilan tanpa prosedur medis, protes massal, dan eksodus tenaga kerja intelektual menyebabkan ketidakstabilan sosial dan beban fiskal besar. Dampaknya tidak hanya pada militer, tetapi juga merembes ke sektor ekonomi dan tenaga kerja.

Konflik internal, seperti pemberontakan Wagner, menunjukkan rapuhnya loyalitas vertikal dalam sistem Putinisme. Ketergantungan pada *patron-client system* tanpa kontrol institusional telah menghasilkan disintegrasi internal yang memperparah performa militer dan persepsi otoritas negara.

Ketergantungan ekonomi dan keuangan terhadap Tiongkok menjadi indikator *overbalancing* yang bersifat strategis. Penguatan penggunaan yuan, keterlibatan China dalam jalur perdagangan Arktik, dan dominasi merek serta sistem keuangan Tiongkok menunjukkan pergeseran relasi dari simbiosis menjadi subordinasi.

Konsolidasi Dunia Barat menunjukkan bahwa kebijakan agresif Rusia telah memperkuat aliansi lawannya. Peningkatan anggaran militer negara NATO, penguatan *forward presence*, dan penyatuan opini publik menunjukkan bahwa kebijakan Rusia justru menguatkan musuh strategisnya.

Masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO memperluas ancaman bagi

perimeter pertahanan Rusia. Akses langsung NATO ke wilayah sekitar St. Petersburg dan Arktik memaksa Moskow merevisi doktrin militernya dan menyebar sumber dayanya secara lebih tipis.

Penurunan status Rusia sebagai *great power* ditandai dengan isolasi diplomatik, pengurangan kontak tinggi, dikeluarkan dari organisasi internasional, dan runtuhnya pengaruh *soft power* energi. Penurunan ini tidak hanya simbolis, tetapi juga berdampak struktural pada kemampuan Rusia dalam memproyeksikan kekuatan dan pengaruh global.

Dengan demikian, dampak-dampak pasca-invasi yang dikategorikan sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa keputusan untuk menggunakan kekuatan militer dalam skala besar adalah kebijakan *overbalancing* karena hasil akhirnya memperburuk posisi strategis Rusia secara sistemik.

Analisis berdasarkan parameter *inward-looking* dan *outward-looking* memperkuat argumen bahwa dalam konteks Rusia, perang bukan hanya respons terhadap ancaman eksternal, tetapi juga cerminan kegagalan dalam membaca dan mengelola dinamika domestik dan internasional secara seimbang.

KESIMPULAN

Analisis terhadap invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 melalui lensa realisme neoklasik menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Rusia, khususnya keputusan untuk menggunakan kekuatan militer secara langsung, tidak dapat dilepaskan dari interaksi kompleks antara tekanan sistemik dan dinamika domestik. Dengan mengurai variabel independen (distribusi kekuasaan

internasional), intervening (hubungan negara-masyarakat, persepsi pemimpin, budaya strategis, dan institusi domestik), hingga variabel dependen (hasil kebijakan dan posisi internasional), studi ini mengonfirmasi bahwa keputusan invasi merupakan bentuk *overbalancing* yang membawa konsekuensi strategis, politik, dan ekonomi yang merugikan Rusia.

Secara konseptual, temuan ini menggarisbawahi dua kritik penting terhadap realisme neoklasik. Pertama, penyamaan otomatis antara tindakan perang dan *overbalancing* menimbulkan reduksionisme analitis. Perang, dalam kondisi tertentu, bisa jadi merupakan opsi rasional negara dalam menghadapi ancaman eksistensial. Namun, dampak jangka panjangnya harus menjadi ukuran utama dalam menilai apakah kebijakan tersebut efektif atau justru kontra-produktif. Kedua, kerangka realisme neoklasik rentan terhadap kesalahan *argumentum ad nauseam*, yakni mengulang-ulang penjelasan berbasis variabel yang sama untuk setiap fenomena konflik tanpa menyertakan konteks kasus yang unik dan dinamis.

Untuk menghindari reduksi semacam itu, studi ini mengembangkan pendekatan evaluatif berbasis *inward-looking* dan *outward-looking* yang berfungsi mengkualifikasi dampak domestik dan internasional pasca-invasi. Dari sisi *inward-looking*, invasi menyebabkan keruntuhan koordinasi militer, krisis logistik, kegagalan mobilisasi, tekanan fiskal, ketergantungan pada Tiongkok, dan konflik internal seperti pemberontakan Wagner. Dari sisi *outward-looking*, kebijakan Rusia telah memperkuat NATO secara strategis dan simbolik, menyebabkan ekspansi keanggotaan baru, serta merusak status Rusia sebagai

kekuatan besar secara diplomatik dan ekonomi.

Dengan demikian, meskipun secara taktis invasi tersebut mungkin dimaksudkan sebagai tindakan preventif untuk mempertahankan ruang strategis Rusia, hasil akhirnya menunjukkan bahwa kebijakan ini telah menimbulkan *strategic backlash* yang memperlemah postur kekuatan Rusia secara menyeluruh. Overbalancing, dalam konteks ini, bukan hanya disebabkan oleh kalkulasi ancaman yang keliru, tetapi juga oleh ketidakmampuan negara dalam menyeimbangkan dinamika domestik dan internasional.

Sebagai penutup, studi ini menegaskan pentingnya realisme neoklasik sebagai alat analisis kebijakan luar negeri yang mampu menjembatani faktor sistemik dan domestik, namun juga menyoroti batas-batas analitisnya. Diperlukan fleksibilitas konseptual dan pemahaman kontekstual dalam menerapkan teori ini agar tidak terjebak dalam simplifikasi dan generalisasi yang melemahkan ketajaman akademik. Kasus Rusia-Ukraina menjadi contoh nyata bagaimana interaksi faktor internal dan eksternal yang tidak terkelola dengan baik dapat mengakibatkan kebijakan luar negeri yang kontraproduktif dan destruktif secara strategis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boute, A. (2022). *Energy Law in Russia: The Context, Legislation, and Practice*. Oxford University Press.

Dyson, S. (2009). *The Blair Identity: Leadership and Foreign Policy*. Manchester University Press.

Lobell, S. E., Ripsman, N. M., & Taliaferro, J. W. (Eds.). (2009). *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*. Cambridge University Press.

Lobell, S. E., Ripsman, N. M., & Taliaferro, J. W. (2016). *The Challenge of Grand Strategy: The Great Powers and the Broken Balance between the World Wars*. Cambridge University Press.

Mearsheimer, J. (2022). *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. Yale University Press.

Sakwa, R. (2018). *Russia Against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order*. Cambridge University Press.

Schweller, R. L. (2006). *Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power*. Princeton University Press.

Taylor, B. (2018). *The Code of Putinism*. Oxford University Press.

Varpahovskis, E. (2020). *Sport, Soft Power and Nation Branding in the Post-Soviet Region*. Routledge.

Artikel Jurnal

Ito, T. (2023). Strategic miscalculation and overbalancing in Russian foreign policy. *Journal of Strategic Studies*, 46(2), 213–232.

Trofimov, Y. (2021). Russia's Authoritarian Evolution. *Foreign Affairs*, 100(6), 34–43.

Zabrotskyi, M. (2022). Operational flaws in Russian military planning. *Ukrainian Military Review*, 18(4), 12–22.

Laporan dan Data Pemerintah

Chatham House. (2023). *Transatlantic Unity and NATO After Ukraine*. <https://www.chathamhouse.org/>

European Union Agency for Asylum. (2022). *Country Reports: Russia*. <https://euaa.europa.eu/>

Kremlin. (2022). Presidential speeches archive. <http://en.kremlin.ru/events/president/news>

Levada Center. (2022). *Public Opinion Polls*. <https://www.levada.ru/en/>

NATO. (2022, 2023). *Summit Declarations and Defense Posture Reports*. <https://www.nato.int>

OHCHR. (2022). *UN Human Rights Reports on Russia*. <https://www.ohchr.org>

United Nations. (2022). *General Assembly Resolution on Ukraine*. <https://www.un.org/en/>

Berita dan Website

BBC. (2021, September 20). Russia's ruling party wins election. <https://www.bbc.com/news/world-europe-58614262>

BBC. (2022, September 29). Russia's mobilisation causes protests. <https://www.bbc.com/news/world-europe-63031343>

Business Insider. (2022, December 18). Russia pivots to Chinese payment

systems.

<https://www.businessinsider.com/russia-china-unionpay-sanctions-swift-cards-2022-12>

FIFA. (2022). Russia excluded from FIFA competitions. <https://www.fifa.com/>

Reuters. (2024). *Russian Budget Revenue Declines in 2023*. <https://www.reuters.com/>

The Guardian. (2022). IOC urges exclusion of Russian athletes. <https://www.theguardian.com/>

UN News. (2022). *UNGA votes to suspend Russia from Human Rights Council*. <https://news.un.org>

YLE News. (2022). Public support for NATO grows in Finland. <https://yle.fi/>

Zakharova, M. (2022). Russia's IT brain drain. *Moscow Times*. <https://www.themoscowtimes.com/>